

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan bentuk pembaruan dalam kebijakan pendidikan nasional yang lahir sebagai respons atas tuntutan zaman yang terus berkembang dan tantangan pembelajaran yang semakin kompleks. Kurikulum ini disusun dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, sekaligus memberikan keleluasaan bagi sekolah, pendidik, dan siswa dalam merancang proses pembelajaran yang adaptif terhadap potensi individu, latar belakang sosial, serta kondisi lokal masing-masing (Idris, 2023).

Diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kurikulum Merdeka menjadi salah satu inisiatif strategis dalam menjawab tantangan pendidikan di era kontemporer, termasuk akibat disrupsi besar yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Melalui kurikulum ini, sekolah memperoleh otonomi yang lebih luas untuk mengembangkan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata siswa di lapangan (Rani, 2023).

Salah satu karakter utama dari kurikulum ini adalah penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam kerangka ini, guru tidak lagi sekadar menjadi penyampai materi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Fleksibilitas dalam pemilihan materi ajar, metode pembelajaran, serta waktu dan strategi evaluasi memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik dan karakter secara lebih optimal (Tuerah, 2022).

Struktur Kurikulum Merdeka juga disusun dengan prinsip kesederhanaan dan kelenturan, sehingga memudahkan guru dalam menyesuaikan proses belajar dengan keunikan masing-masing siswa. Fokus utama dari kurikulum ini adalah penguatan kompetensi esensial serta pembangunan karakter yang sejalan dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Profil Pelajar Pancasila. Profil ini terdiri dari enam dimensi utama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreatif (Tunas, 2024).

Dari sisi filosofis dan dasar regulasi, Kurikulum Merdeka berakar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya pengembangan potensi peserta didik secara

utuh—baik secara intelektual, spiritual, emosional, maupun sosial. Kurikulum ini tidak semata mengubah konten pelajaran, melainkan juga mengusung paradigma baru dalam dunia pendidikan, yakni semangat “merdeka belajar” yang menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar, bukan sekadar objek pasif penerima materi (Darmayani, 2023).

Sejalan dengan pandangan tersebut, H. M. Arief Rahman menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan desain pendidikan yang menempatkan pembangunan karakter sebagai inti dari proses pembelajaran. Ia menekankan pentingnya pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada kemampuan peserta didik dalam menghadapi persoalan nyata melalui model pembelajaran berbasis masalah serta pemanfaatan teknologi digital sebagai alat bantu dalam proses belajar (Barlian, 2022).

Dengan pendekatan semacam itu, Kurikulum Merdeka dapat dipandang sebagai langkah reformasi pendidikan yang *progresif* dan *visioner*. Meskipun dalam praktiknya dihadapkan pada berbagai tantangan implementatif, kurikulum ini tetap diyakini mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional dan

menyiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh menghadapi perubahan global yang dinamis dan penuh ketidakpastian (Ulu, 2023).

Pada akhirnya, Kurikulum Merdeka menjadi simbol perubahan arah pendidikan yang lebih kontekstual, inklusif, dan menyeluruh. Kurikulum ini membuka ruang bagi peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, empati sosial, semangat kebangsaan, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah (Mahfud, 2025).

B. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan terencana untuk membimbing serta membentuk peserta didik agar mampu memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Tujuan utama dari PAI adalah membentuk pribadi Muslim yang memiliki keimanan kuat, ketakwaan yang mendalam, serta akhlak yang luhur, sehingga nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi menjadi pedoman hidup dalam tindakan sehari-hari. Sasaran pendidikan nilai adalah terciptanya insan yang berakhlak,

memiliki nilai-nilai luhur dan mulia maka model dan pendekatan yang dilakukan adalah pendidikan penanaman nilai itu (Ridlo, 2020). Proses pendidikan ini mencakup kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang disusun secara terstruktur agar peserta didik dapat menjalani kehidupan sesuai prinsip-prinsip Islam (Siregar, 2024).

Dalam perspektif teoritis, Pendidikan Agama Islam erat kaitannya dengan tiga konsep utama dalam khazanah keilmuan Islam, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib* (Utomo & Qolbiatun, 2023). *Tarbiyah* merujuk pada proses pengasuhan dan pengembangan potensi individu secara menyeluruh, baik spiritual, emosional, maupun sosial. *ta'lim* lebih terfokus pada proses penyampaian ilmu dan penguasaan materi keagamaan, sedangkan *ta'dib* menekankan pada penanaman nilai-nilai moral, adab, dan etika Islami. Ketiga konsep ini membentuk satu kesatuan sistem pendidikan yang saling melengkapi dalam upaya mencetak insan kamil, yakni pribadi Muslim yang utuh secara spiritual, intelektual, dan sosial (Firmansyah, 2019).

Lebih dari itu, PAI memainkan peran vital dalam proses pembentukan karakter siswa. Melalui pendekatan pedagogis yang terarah dan terpadu, PAI tidak hanya mengajarkan materi agama, tetapi juga menanamkan nilai-

nilai Islami yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir peserta didik. Pembelajaran ini bertujuan mengembangkan kepribadian yang tangguh, toleran terhadap perbedaan, serta adaptif terhadap tantangan zaman, tanpa kehilangan identitas keislaman yang melekat (Afiqi & Setyowati, 2021). Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, PAI berfungsi sebagai instrumen penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, terbuka terhadap keragaman, dan mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sosial (Saadah, 2024).

Dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan integratif, Pendidikan Agama Islam tidak hanya dilihat sebagai proses transfer ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai fondasi dalam pembangunan karakter dan identitas diri peserta didik (Zulfa, 2013). Melalui proses pendidikan yang berkelanjutan dan kontekstual, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan keluhuran moral, sehingga mampu bersikap bijak dalam menghadapi tantangan global (Kamali, 2018).

Dalam konteks yang lebih spesifik, pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah non-Muslim menjadi bentuk layanan pendidikan agama yang menjamin hak konstitusional

peserta didik beragama Islam. Meskipun berada dalam lingkungan pendidikan yang mayoritas beragama non-Islam, seperti sekolah Katolik atau Kristen, peserta didik tetap memperoleh hak atas pembelajaran agama sesuai keyakinannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak menerima pendidikan agama berdasarkan agama yang dianutnya dan diberikan oleh guru yang seagama (Fauziah, 2019).

Dengan demikian, pembelajaran PAI di sekolah non-Muslim menjadi manifestasi dari semangat inklusivitas dan perlindungan hak beragama dalam sistem pendidikan nasional. Pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah non-Muslim umumnya disesuaikan dengan jadwal dan fasilitas sekolah, dan biasanya dilaksanakan dalam bentuk kelas khusus bagi siswa Muslim. Materi pembelajaran mencakup aspek-aspek fundamental seperti akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah Islam, sebagaimana yang diajarkan di sekolah umum lainnya. Proses pembelajarannya juga mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dan dalam beberapa kasus dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual dan multikultural agar siswa mampu memahami

nilai-nilai Islam dalam kerangka keberagaman (Wahyuni, 2017).

Ruang lingkup materi yang diajarkan tidak berbeda secara prinsip dengan sekolah umum Muslim, mencakup lima aspek utama:

1. ‘Aqīdah, yaitu penanaman nilai-nilai keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadha-qadar;
2. ‘Ibādah dan Fiqih, yaitu pengenalan dan praktik dasar keislaman seperti salat, puasa, zakat, dan tata cara bersuci;
3. Al-Qur’ān dan Ḥadīṣ, yang mencakup kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai suci dari wahyu Allah dan sabda Nabi;
4. Akhlāq, yang menanamkan nilai-nilai etika, sopan santun, kejujuran, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari;
5. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), yang membahas perjalanan sejarah Nabi, sahabat, dan perkembangan peradaban Islam (Baydowi, 2024).

Dalam konteks sekolah non-Muslim, pembelajaran ini menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis, menekankan pada pentingnya nilai moderasi beragama, toleransi antarumat, dan penguatan identitas keislaman yang terbuka serta damai. Dengan strategi pengajaran yang adaptif, guru PAI dituntut tidak hanya menyampaikan materi ajar,

tetapi juga membimbing siswa untuk tetap teguh pada keimanan sambil menjunjung tinggi sikap saling menghormati di lingkungan multicultural (Rachmat, 2022).

C. Moderasi Beragama

Kementerian Agama Republik Indonesia (2023) mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang dan sikap keberagamaan yang menekankan pentingnya keseimbangan, keharmonisan, serta penghormatan terhadap keberagaman, sambil menjauhi segala bentuk sikap berlebihan, baik dalam keyakinan maupun tindakan. Pendekatan ini bertujuan mendorong terwujudnya kehidupan beragama yang damai, melalui pengamalan nilai-nilai seperti keadilan sosial, kesetaraan antarumat, toleransi dalam perbedaan, serta keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama di tengah kehidupan masyarakat yang plural (Junaedi, 2019).

Dalam kerangka ini, toleransi dipahami sebagai sikap menghargai perbedaan keyakinan; keadilan sebagai pemberian hak yang setara tanpa diskriminasi agama; kesetaraan menuntut pengakuan terhadap hak-hak semua individu; dan keseimbangan mencerminkan harmoni antara nilai-nilai agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi landasan penting dalam merawat

kerukunan umat, mencegah konflik sosial, dan mengembangkan pemahaman keagamaan yang damai dan inklusif (Wahid, 2024).

Secara etimologis, istilah “moderasi” berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang mengandung makna tindakan untuk tetap berada di jalan tengah—tidak condong pada sikap ekstrem di salah satu sisi (Nurdin, 2021). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan sebagai upaya meredam kekerasan atau ekstremisme, sedangkan seseorang yang bersikap moderat cenderung memilih pendekatan yang seimbang dan tidak berlebih-lebihan (Natoni, 2025). Konsep ini menekankan pentingnya pengendalian diri dan rasionalitas dalam menyikapi berbagai perbedaan pandangan dalam masyarakat.

Lebih lanjut (Arief, 2025), menekankan bahwa pribadi yang moderat adalah mereka yang menjalani hidup dengan sikap yang wajar, tidak ekstrem, serta bersikap adil dan seimbang dalam hubungan sosial maupun dalam berinteraksi dengan lembaga negara. Dalam bahasa Inggris, istilah *moderation* sering kali dimaknai sebagai *core* (inti), *standard* (ukuran), *average* (rata-rata), dan *non-aligned* (tidak memihak), yang semuanya menunjuk pada posisi yang netral, adil, dan berimbang.

Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep moderasi dikenal dengan istilah *wasatīyyah* atau *wasat*, yang memiliki makna serupa dengan *tawāsut* (berada di tengah), *i'tidāl* (adil), dan *tawāzun* (seimbang). Individu yang menjalankan prinsip ini disebut *wasīf*, yang dalam bahasa Indonesia telah diadopsi sebagai "*wasīf*"—penengah dalam konflik. Istilah-istilah tersebut mengandung makna substansial mengenai keseimbangan dan keadilan, terutama ketika dihadapkan pada tarik-menarik antara berbagai kecenderungan ekstrem dalam praktik keagamaan (Arifan, 2023).

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh cendekiawan Muslim kontemporer, seperti M. Quraish Shihab, yang memaknai *wasatīyyah* sebagai bentuk sikap beragama yang menjunjung keseimbangan, menjauhi fanatisme, serta menjadikan nilai toleransi dan keadilan sebagai inti dari pengamalan agama (Dzakiyyah, 2024). Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi memperkenalkan konsep moderasi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu pendekatan yang menyeimbangkan antara teks-teks suci dengan realitas kontekstual, serta antara kepentingan individu dan kolektif. Fakhruddin ar-Razi dalam tafsir *Mafātīḥ al-Ghayb* juga menafsirkan frasa *ummatan wasatan* sebagai umat yang adil dan seimbang dalam segala aspek kehidupan,

termasuk dalam ibadah, interaksi sosial, dan penilaian etis (Khalida, 2023).

Di sisi lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) mendefinisikan istilah “beragama” sebagai suatu bentuk keyakinan terhadap Tuhan yang diwujudkan dalam pelaksanaan ajaran dan kewajiban keagamaan. Secara praktis, beragama mengandung makna ketaatan dalam ibadah sesuai ajaran masing-masing agama. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini juga bisa dimaknai secara kiasan, misalnya dalam ungkapan “beragama pada harta,” yang berarti mendewakan sesuatu secara berlebihan (Ismah, 2021). Dalam makna yang lebih filosofis, beragama semestinya dimaknai sebagai sikap hidup yang penuh kasih sayang, membawa kedamaian, dan membangun harmoni dengan sesama manusia (Albana, 2022).

Berdasarkan berbagai pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama mencerminkan suatu pola sikap yang konsisten berada di jalur tengah, menolak segala bentuk ekstremisme, dan menjunjung nilai-nilai keadilan serta toleransi dalam pelaksanaan ajaran agama. Namun, agar suatu sikap dapat dikatakan moderat, diperlukan tolok ukur dan indikator yang jelas. (Mirsal, 2022), menyatakan bahwa moderasi beragama merupakan kunci

strategis dalam menciptakan keharmonisan sosial, tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam konteks global yang penuh keragaman dan kompleksitas budaya.

Sebagai Penutup, (Ulinnuha, 2020) menekankan bahwa pilihan untuk menerapkan moderasi beragama dengan menolak sikap ekstrem maupun liberal dalam beragama adalah upaya untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Melalui pendekatan ini, setiap pemeluk agama diharapkan mampu memperlakukan sesama secara hormat, menerima keberagaman, dan hidup berdampingan dalam kedamaian. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, moderasi beragama bukan hanya menjadi pilihan bijak, melainkan juga sebuah keharusan demi kelangsungan peradaban yang damai dan harmonis.

D. Nilai–Nilai Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan sikap tengah dalam menjalankan ajaran agama. Artinya, seseorang tidak bersikap ekstrem atau berlebihan dalam memahami dan mempraktikkan keyakinannya. Moderasi ini penting karena Indonesia adalah negara yang majemuk, baik dalam hal agama, budaya, maupun etnis. Moderasi beragama hadir untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan antar umat beragama (Masykhur, 2021).

Secara umum, nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama antara lain:

- a. *Tawāsuṭ*, (bersikap tengah). Tidak ekstrem dalam beragama, baik ke arah liberal maupun radikal.
- b. *I'Tidāl*, (adil dan seimbang). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara individu dan masyarakat.
- c. *Tasāmuḥ* (toleransi). Menghormati perbedaan dan siap hidup berdampingan secara damai.
- d. *Syūrā* (musyawarah). Mengedepankan dialog dan mufakat dalam menyelesaikan perbedaan.
- e. *Iṣlāḥ* (perbaikan). Selalu berusaha memperbaiki diri dan masyarakat (Salamudin, 2024).

Nilai-nilai moderasi beragama menurut sudut pandang Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan seperangkat pedoman dan karakter yang dijadikan pijakan dalam menciptakan kehidupan beragama yang seimbang, damai, dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kementerian Agama menegaskan bahwa moderasi beragama bukan berarti mengubah ajaran agama, melainkan menekankan sikap beragama yang mengambil jalan tengah (*wasatiyyah*), menghargai

keberagaman, dan menolak paham ekstrem serta tindakan intoleran (Sifuddin, 2019).

Kementerian Agama mengidentifikasi empat indikator utama dalam moderasi beragama, yaitu:

- a. Komitmen terhadap Negara. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaksanaan ajaran agama harus selaras dengan semangat nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air. Nilai cinta tanah air sebagai bagian dari iman (*ḥubbul waṭan minal īmān*) menjadi fondasi kesadaran bahwa nilai-nilai keagamaan dapat sejalan dengan semangat kebangsaan. Melalui moderasi beragama, umat beragama didorong untuk berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, menjunjung tinggi konstitusi, serta menghormati Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Toleransi. Dalam konteks moderasi beragama, toleransi berarti menghargai perbedaan dalam keyakinan, agama, suku, maupun budaya. Kementerian Agama mendorong terwujudnya komunikasi antar umat beragama, kolaborasi lintas keyakinan, dan penolakan terhadap ujaran kebencian serta perlakuan diskriminatif. Toleransi ini berlaku tidak hanya antaragama, tetapi juga di dalam satu

agama, dengan menghormati perbedaan pandangan dan cara beribadah.

- c. Penolakan terhadap Kekerasan: Salah satu pilar moderasi beragama adalah penolakan terhadap segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, baik berupa kekerasan fisik, ucapan, maupun simbolik. Kemenag menekankan bahwa ajaran agama sejatinya membawa pesan damai dan kasih sayang. Oleh karena itu, penyelesaian setiap konflik dianjurkan melalui jalur damai, musyawarah, dan proses hukum (Zahdi, 2021).

Dalam Kurikulum Merdeka, moderasi beragama menjadi bagian penting dari pendidikan karakter siswa. Nilai ini tidak hanya diajarkan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), tetapi juga diterapkan di semua mata pelajaran. Tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang memiliki sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan mencintai perdamaian. Moderasi beragama di sini berarti bersikap seimbang dalam beragama, tidak berlebihan atau fanatik, tetapi tetap teguh dalam keyakinan sambil menghormati orang lain yang berbeda (Rusydiyah, 2024).

Ahmad Syafii Maarif, dikenal sebagai tokoh intelektual Muslim Indonesia, menekankan pentingnya moderasi dalam beragama sebagai upaya untuk memperkuat

pluralisme dan toleransi di Indonesia. Menurutnya, moderasi beragama mencakup reinterpretasi teks-teks keagamaan agar pemahaman terhadap agama lebih substansial dan esensial, yang pada akhirnya mendorong terciptanya toleransi antar umat beragama (Saputra, R 2020).

Ada empat nilai utama yang ditanamkan dalam Pendidikan islam terkait moderasi beragama menurut Syamsul Kurniawan, meliputi:

- a. Komitmen kebangsaan. Komitmen ini mengajarkan bahwa menjalankan ajaran agama harus sejalan dengan cinta pada Indonesia, termasuk menghormati Pancasila dan konstitusi negara.
- b. Toleransi. Siswa dilatih untuk menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan pendapat yang ada di sekitar mereka.
- c. Anti kekerasan. Siswa diajarkan bahwa agama bukan alasan untuk membenci atau menyakiti orang lain. Semua bentuk kekerasan tidak dibenarkan dalam ajaran agama.
- d. Menghargai budaya lokal. Siswa diajak untuk melihat bahwa tradisi dan kearifan lokal bisa sejalan dengan nilai-nilai agama selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama (Suprpto, 2020).

Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk sikap moderat peserta didik. Moderasi beragama dalam Islam berarti mengambil jalan tengah (*wasatiyyah*), tidak berlebihan atau ekstrem, dan mampu menyesuaikan ajaran agama dengan keadaan sosial di sekitarnya. Islam mengajarkan sikap adil, saling menghargai, menghormati perbedaan, dan mencintai perdamaian. Semua nilai tersebut sangat penting diajarkan agar peserta didik tidak hanya memahami agama dari sisi teorinya saja, tapi juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang beragam (Putri, 2024).

Dalam pembelajaran PAI, nilai komitmen kebangsaan diwujudkan dengan menanamkan rasa cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Peserta didik diajak untuk berkontribusi menjaga persatuan bangsa sebagai bagian dari menjalankan ajaran Islam. Nilai toleransi ditekankan dengan memberikan pemahaman tentang perbedaan agama, mazhab, dan budaya yang harus dihargai dengan pikiran terbuka. Penolakan terhadap kekerasan dicontohkan melalui sikap Nabi Muhammad SAW yang berdakwah dengan damai dan penuh kasih, tanpa paksaan. Sementara itu, nilai menghargai budaya lokal ditunjukkan melalui penerimaan terhadap tradisi selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, bahkan

budaya lokal bisa menjadi sarana dakwah yang ramah dan menyentuh masyarakat. (Hidayati, 2023).

E. Dalil – Dalil Moderasi Beragama

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى
اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَحِيمٌ﴾

Artinya:

“Demikianlah Kami jadikan kamu ummat Wasathan, agar kamu menjadi saksi atas amalan manusia, dan agar Rasūlullāh (Muhammad) menjadi saksi atas amalanmu.” Dan Kami jadikan kamu ummat Wasathan, agar kamu menjadi saksi atas amalan manusia, dan agar Rasūlullāh (Muhammad) menjadi saksi atas amalanmu, atau tidak menjadikan kiblat sebelumnya sebagai kiblatmu, kecuali mengetahui siapa yang mundur. Dan tentu (pergerakan kiblat) nampaknya sangat sulit, kecuali bagi mereka yang mendapat petunjuk dari Allah. Dan Allah tidak akan menyia nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah: 143).

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ
الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ﴾

Artinya:

(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela? (Q.S. Al – Mulk: 3).

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ
كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya:

“Dan Dia lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya dengan buah-buahan berpasang pasangan. Allah menutup malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya.” (Q.S. Ar-Ra’d: 3)

Surat al-Baqarah ayat 143 memberikan penegasan tentang konsep moderasi dalam beragama dengan menyebut bahwa umat Islam dijadikan sebagai *umat wasaṭiyyah*, yaitu umat yang berada di posisi tengah. Konsep ini mencerminkan bahwa umat Islam dituntut untuk menjalani kehidupan

beragama secara seimbang tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan baik dalam aspek ibadah, kehidupan sosial, maupun politik (Mufaridah, 2025). Dengan kata lain, umat Islam diharapkan mampu menjadi teladan melalui sikap keagamaan yang mencerminkan keseimbangan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasūlullāh yang menjalankan ajaran dengan penuh hikmah dan tanpa kecenderungan ekstrem. Lebih jauh lagi, ayat ini menegaskan bahwa umat Islam memiliki peran penting sebagai saksi bagi seluruh umat manusia, sementara Rasūlullāh menjadi saksi bagi umat Islam. Hal ini mengandung makna bahwa umat Islam harus mampu menunjukkan nilai-nilai kebenaran Islam secara damai, santun, dan bijaksana, bukan dengan pendekatan kekerasan atau pemaksaan (Sumbulah, 2022).

Selanjutnya, peristiwa perubahan arah kiblat dari Baitulmaqdis ke Ka'bah menjadi bentuk ujian dari Allah kepada umat Islam untuk menilai sejauh mana mereka menunjukkan loyalitas dan kepatuhan terhadap wahyu-Nya. Ujian ini sekaligus menjadi momen penting yang menegaskan pentingnya mempertahankan sikap moderat dalam menjalankan agama. Allah juga memberikan jaminan bahwa petunjuk-Nya akan menjadi penuntun agar umat Islam tetap berada di jalan yang lurus, yaitu jalan yang seimbang antara

urusan dunia dan akhirat, serta terlindungi dari jebakan ekstremisme dan fanatisme yang dapat merusak. Moderasi beragama menjadi bagian integral dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bersikap arif, seimbang, dan penuh kasih terhadap sesama (Faelasup, 2021).

Dalam lanjutan penguatan nilai moderasi, surat al-Mulk ayat 3 mengingatkan bahwa ciptaan Allah dipenuhi dengan unsur keseimbangan dan keteraturan yang sempurna. Hal ini seharusnya menjadi cerminan bagi umat Islam dalam menjalani hidup dengan cara yang proporsional, tidak condong pada sikap berlebihan maupun lalai. Allah menunjukkan kesempurnaan penciptaan-Nya, seperti langit yang bertingkat-tingkat tanpa cacat, sebagai perumpamaan akan pentingnya keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk menjalankan ajaran agama secara konsisten dan seimbang, baik dalam ibadah maupun dalam relasi sosial, agar terhindar dari praktik ekstremisme (Aziz, 2022).

Lebih dari itu, pemahaman moderasi beragama dalam konteks ini berarti mengikuti ajaran Islam secara bijak dan berimbang, dengan tetap berpegang pada sunnah Rasūl dan prinsip-prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, perdamaian, dan harmoni dalam setiap aspek

kehidupan. Sebagai Tuhan yang Maha Sempurna, Allah telah memberikan arahan agar umat-Nya tidak tergelincir dalam perilaku yang melampaui batas atau mengganggu keseimbangan kehidupan. Dengan demikian, sikap moderat dalam beragama merupakan bentuk ketaatan terhadap petunjuk Ilahi (Habibie, 2021).

Sementara itu, dalam surat Ar-Ra'd ayat 3, al-Qur'an menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan umat beragama lainnya. Ayat ini memberi isyarat bahwa kehidupan yang harmonis dapat tercipta bila umat Islam mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang mengandung prinsip moderasi dan keseimbangan. Proses mendalami ajaran Islam yang toleran dan penuh keseimbangan dianggap sebagai jalan untuk membuka rahasia kehidupan sekaligus merasakan indahnya toleransi terhadap keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Hal ini pula yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dalam sejarahnya, ketika beliau menetapkan *Piagam Madinah* sebagai dasar hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat multikultural (Farida, 2020).

F. Dimensi Nilai - Nilai Moderasi Beragama Dalam KM PAI

Kurikulum Merdeka mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) melalui pendekatan yang adaptif, kontekstual, dan berfokus pada penguatan karakter siswa. Integrasi ini tercermin secara langsung dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CP) dan materi ajar yang mendorong siswa memahami ajaran Islam secara seimbang (*tawāsuʿ*), adil (*i'tidāl*), dan toleran (*tasāmuh*), serta aktif bermusyawarah (*syūrā*) dalam kehidupan sosialnya (Maknun, 2025).

Buku ajar PAI secara eksplisit memuat tema-tema keberagaman dan hidup damai dalam kebersamaan, sementara metode pembelajaran diarahkan untuk menumbuhkan partisipasi, empati, dan refleksi kritis siswa terhadap keberagaman agama dan budaya di sekitarnya. Selain itu, program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi ruang nyata penanaman nilai moderasi melalui proyek kolaboratif yang melibatkan lintas agama dan budaya. Keseluruhan desain Kurikulum Merdeka secara substantif membentuk ekosistem pembelajaran yang tidak hanya memperkuat pemahaman keagamaan, tetapi juga mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang inklusif, berpikiran terbuka, serta siap hidup damai di tengah masyarakat majemuk (Setiawan, 2025).

Sebagai bagian dari strategi pendidikan karakter, Kurikulum Merdeka mengadopsi prinsip-prinsip moderasi

beragama ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Integrasi ini bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga berakhlak terpuji serta mampu menjalani kehidupan secara harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai moderasi yang ditanamkan tersebut memiliki kesesuaian yang erat dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila, terutama pada aspek "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia," serta "berkebinekaan global" yang mendorong sikap terbuka, toleran, dan adaptif terhadap perbedaan.

Tujuan utama integrasi ini adalah membekali siswa dengan pemahaman keagamaan yang inklusif, adil, dan kontekstual agar mampu menjadi agen perdamaian dalam masyarakat yang majemuk. Konsep moderasi beragama yang diangkat dalam Kurikulum Merdeka mencakup sejumlah nilai penting, meliputi:

1. *Tawāsuṭ* (sikap tengah)
2. *Tasāmuḥ* (toleransi)
3. *I'tidāl* (keadilan)
4. *Syūrā* (musyawarah) (Muhtarom, 2021).

Nilai-nilai ini dipadukan secara integral dalam proses pembelajaran melalui pendekatan kontekstual dan

transformatif yang 1 mengaitkan ajaran Islam dengan realitas kehidupan sosial peserta didik. Prinsip-prinsip ini secara konkret direfleksikan dalam struktur Capaian Pembelajaran (CP) PAI. Mengacu pada Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 032/H/KR/2024, peserta didik diarahkan untuk tidak hanya memahami ajaran agama secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Mereka diharapkan memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan, menolak segala bentuk fanatisme yang sempit, serta menghormati keberagaman budaya dan keyakinan yang ada. Hal ini menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka tidak semata-mata berorientasi pada penguasaan aspek kognitif, tetapi juga berfokus pada pengembangan dimensi afektif dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal (Duryat, 2019).

Metode pembelajaran yang digunakan dalam implementasi nilai moderasi beragama meliputi pendekatan partisipatif dan reflektif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi (*role play*), serta pembelajaran berbasis proyek. Semua ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam mengeksplorasi dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam konteks sosialnya. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pembelajaran berbasis

pengalaman nyata (*experiential learning*) yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*), guna menumbuhkan pemahaman keagamaan yang etis, rasional, dan humanis (Salamudin, 2024).

Dalam aspek materi, buku teks resmi “Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti” untuk SMP Kelas VIII telah dirancang untuk 2 mendukung integrasi nilai-nilai moderasi beragama. Misalnya, dalam bab “Indahnya Hidup dalam Kebersamaan”, siswa diajak memahami pentingnya toleransi antarumat beragama dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam bingkai persaudaraan (*ukhuwwah waṭaniyyah*) (Pudjiani, 2021). Selain itu, materi juga menekankan pentingnya menolak kekerasan dan ekstrimisme, serta membangun sikap tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ihsan, 2022). Indikator pencapaian moderasi beragama dalam pembelajaran PAI mencakup tiga ranah utama: *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik*. Ranah *kognitif* mencakup kemampuan memahami ajaran Islam secara terbuka dan moderat. Ranah *afektif* menekankan sikap empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Sementara itu, ranah *psikomotorik* diwujudkan dalam perilaku damai, partisipasi dalam kegiatan lintas agama dan budaya, serta penerapan nilai-nilai keadilan

dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari (Wahidah, 2024).

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah program kokurikuler berbasis proyek yang dirancang dalam Kurikulum Merdeka untuk menanamkan dan memperkuat karakter serta kompetensi sesuai enam dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman & bertakwa, berkebinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Melalui P5, siswa diberi kesempatan merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek nyata yang relevan dengan konteks lokal dan tantangan global, sehingga tidak hanya mengasah kemampuan akademik tetapi juga membentuk karakter, rasa tanggung jawab, dan kepedulian social, proses ini didampingi oleh guru serta berkolaborasi lintas disiplin ilmu (Rizal, 2024).

Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) secara langsung mendukung penguatan nilai-nilai moderasi beragama di sekolah, karena mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan keberagaman sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual. Melalui tema seperti “Kebhinekaan Global”, “Gaya Hidup Berkelanjutan”, atau “Kearifan Lokal”, siswa diajak untuk mengenal, memahami, dan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya di

lingkungannya. Kegiatan proyek ini memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama lintas keyakinan dan membangun empati sosial, sekaligus menghindari sikap ekstrem dan eksklusif (Aminanti, 2024).

Dengan pendekatan berbasis pengalaman dan kolaborasi, P5 menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama seperti *tawāsuṭ* (berjalan di tengah), *tasāmuḥ* (toleransi) dan *i'tidāl* (adil) secara nyata dalam keseharian siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan besar pendidikan nasional yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter pelajar yang inklusif, damai, dan berpikiran terbuka (Maruti, 2023).

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka berperan tidak hanya sebagai kerangka akademik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membentuk karakter peserta didik yang moderat, toleran, dan memiliki semangat kebangsaan. Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam mata pelajaran PAI menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi muda yang siap hidup damai dalam masyarakat yang plural, serta mampu mewujudkan kehidupan beragama yang adil, berimbang, dan humanis di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial keagamaan (Suprpto, 2020).

Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), berpijak pada visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015, visi yang diusung adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, rukun, cerdas, dan sejahtera, dalam rangka mendukung terciptanya bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong (Safe'i, 2019). Dalam konteks ini, nilai-nilai moderasi beragama menjadi bagian krusial, terutama dalam menciptakan harmoni dan pengamalan keagamaan yang tidak ekstrem. Selanjutnya, misi Kementerian Agama menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, serta penguatan kerukunan antar umat. Maka dari itu, visi dan misi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam (Harmi, 2022).

Sejalan dengan itu, Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai wahana pengajaran ajaran Islam, tetapi juga bertujuan membentuk karakter peserta didik melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mencerminkan nilai-nilai Islam secara utuh (Ahmad, 2022). Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di jenjang PAUD/TK,

SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK. bertujuan membangun kompetensi siswa dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Kurikulum Merdeka, pendekatan ini ditekankan melalui pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era modern (Minarni, 2023).

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agama mengembangkan tiga strategi utama dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Pertama, dengan menyisipkan muatan moderasi secara tematik dalam materi ajar Pendidikan Agama Islam yang relevan, agar siswa tidak hanya memahami substansi agama, tetapi juga makna kehidupan yang damai dan toleran (Gilang, 2022).

Kedua, guru didorong menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan kritis seperti diskusi, atau metode *jigsaw learning*, yang menumbuhkan sikap toleransi, demokratis, dan menghargai perbedaan. Strategi ini menjadi sangat relevan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah, karena memberikan ruang kepada siswa untuk berpikir reflektif dan terbuka terhadap keberagaman (Shofyan, 2022).

Ketiga, pelaksanaan pelatihan dan pendidikan tematik mengenai moderasi beragama turut diperkuat untuk membekali guru dengan pemahaman dan metode pengajaran yang tepat. Di samping itu, evaluasi pembelajaran juga menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana internalisasi nilai-nilai moderasi telah tercapai dalam diri peserta didik. (Zahroh, 2020).

Evaluasi ini melibatkan observasi langsung terhadap sikap dan perilaku siswa dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Guru PAI yang berperan sebagai pembina harus memastikan bahwa setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan berlandaskan pada prinsip moderasi, dengan menyajikan materi yang sesuai dengan nilai-nilai toleransi dan kedamaian. Dengan langkah tersebut para pendidik dapat mengukur sejauh mana pemahaman dan pengamalan peserta didik terhadap moderasi beragama (Destriani, 2022).

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sudah mengandung nilai-nilai moderasi, baik secara *eksplisit* maupun *implisit* dengan pendekatan yang menunjukkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya paham isi materi, tapi juga mampu menghayati dan menerapkannya dalam kehidupan yang majemuk. (Silfia, 2024).

Kurikulum Merdeka memberi kebebasan kepada guru untuk merancang pembelajaran yang kontekstual Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI menekankan pada pembentukan karakter siswa yang moderat dalam beragama. Artinya, peserta didik tidak hanya dituntut memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga diarahkan agar mampu menjalankan ajaran Islam dengan sikap yang toleran, tidak ekstrem, dan terbuka terhadap keberagaman. Nilai-nilai seperti perdamaian, tenggang rasa, dan kerukunan menjadi orientasi utama. (Rahmatika, 2022).

Dengan demikian, penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat mencerminkan sikap menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Moderasi beragama yang diajarkan dalam PAI bukan hanya terlihat dari materi ajarnya, melainkan juga dalam perilaku nyata siswa. (Hidayat, 2022). Nilai-nilai moderasi beragama dapat diinternalisasikan melalui sikap, wawasan, serta keterampilan yang dimiliki oleh seluruh komponen dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI). Sikap moderat tercermin dalam keterbukaan terhadap keragaman ajaran, kemampuan menerima perbedaan secara lapang, serta kesediaan untuk menjalin kerja sama lintas keyakinan dengan penuh toleransi dan saling menghormati (Wardati, 2023).

Wujud moderasi dalam diri seseorang tidak hanya terbatas pada keyakinan atau pemikiran, tetapi juga tercermin dalam perilaku nyata yang tampak dalam tutur kata, sikap, dan tindakan sehari-hari. Keterampilan moderat dapat dikenali, misalnya, dari kemampuan berdialog secara produktif dengan individu dari latar belakang berbeda, menciptakan suasana nyaman dan aman bagi orang di sekitarnya, serta menunjukkan sikap adil dan bijak dalam menyampaikan pendapat maupun dalam mengambil keputusan. Selain itu, perilaku moderat juga ditandai dengan orientasi terhadap kemaslahatan bersama, menjunjung tinggi keberagaman, dan selalu mengedepankan kerja sama yang harmonis (Muaz, 2022).

Untuk memperkuat praktik moderasi beragama dalam lingkungan pendidikan, Direktorat Pendidikan Agama Islam telah menetapkan sejumlah langkah strategis. Langkah pertama adalah memperkuat kurikulum PAI—baik dalam rumusan capaian pembelajaran, struktur materi, maupun pengintegrasian nilai moderasi dalam setiap topik pembelajaran. Selanjutnya, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mendorong penerapan prinsip moderasi dalam kurikulum, proses pembelajaran, dan standar kompetensi guru PAI. Langkah ketiga adalah pengembangan

jati diri atau *personal branding* guru PAI sebagai agen moderasi beragama, yang tidak hanya kompeten dalam mengajar, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan, kemampuan menghadapi keragaman budaya, dan kepekaan sosial dalam membimbing siswa di berbagai konteks kehidupan (Munawar, 2024)

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk membentuk karakter peserta didik yang menjunjung tinggi nilai kedamaian, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Kurikulum ini mendorong *internalisasi* prinsip-prinsip moderasi, seperti penguatan sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, serta penolakan terhadap segala bentuk sikap *ekstremisme* dan *eksklusivisme* dalam beragama (Ahmadi, 2022). Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi ruang pengembangan kognisi keagamaan, tetapi juga menjadi wahana pembentukan karakter moderat yang esensial dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

Melalui pembelajaran yang berbasis pada sikap saling menghormati, siswa diperkenalkan pada ajaran Islam yang mengedepankan prinsip kedamaian dan keseimbangan, serta membekali mereka untuk menghadapi tantangan sosial

dengan penuh kebijaksanaan (Khusaini, 2022). Selain itu, moderasi beragama juga diimplementasikan dengan mengedukasi siswa tentang pentingnya hidup harmonis dalam masyarakat yang plural dan memperkuat pemahaman bahwa ajaran Islam sejatinya adalah agama yang mengutamakan kedamaian dan persatuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat menjadi pribadi yang tidak hanya memahami agama secara mendalam, tetapi juga mampu berinteraksi dengan sesama secara harmonis, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta berkontribusi positif dalam masyarakat (Harismawan, 2022).